

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN LINGKUNGAN HIDUP: KASUS NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Siwi Nugraheni¹

Perdagangan internasional dipercaya oleh kaum neoklasik memberi banyak manfaat dalam pembangunan ekonomi sebuah negara (Meier, 1989). Apalagi setelah menyaksikan keberhasilan perekonomian negara-negara seperti Korea, Taiwan dan Brasil yang memperlihatkan bahwa strategi pembangunan yang berorientasi ekspor menjadi kunci meningkatnya kinerja perekonomian mereka (Krueger, 1980) dan berhasil pula menurunkan tingkat pengangguran (Westphal, 1978). Sehingga, banyak negara berkembang mengikuti strategi yang sama. Tetapi ada kekhawatiran bahwa adanya perdagangan internasional akan memperburuk kondisi lingkungan hidup di negara-negara berkembang. Tulisan di bawah ini akan membahas tentang kemungkinan kerusakan lingkungan di negara sedang berkembang yang diakibatkan oleh adanya perdagangan dengan negara-negara lain.

Posisi Negara Berkembang dalam Perdagangan Internasional

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, perdagangan antar negara tumbuh sangat pesat, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Dapat dilihat dari Tabel-1 di bawah ini, untuk periode antara tahun 1985 - 1990 misalnya, ekspor dari negara berkembang meningkat sebesar 41%.

Tabel-1 Volume Ekspor dan Impor Berdasarkan Kelompok Negara (1980 = 100)

Ekspor dan Impor Berdasarkan Kelompok Negara	1960	1975	1985	1990
Ekspor:				
• Negara Maju	24	73	118	153
• Negara Sedang Berkembang	45	86	93	141
Impor:				
• Negara maju	25	74	117	160
• Negara Sedang Berkembang	28	72	101	137

Sumber: UNCTAD, 1991

Menurut jenis barang yang mengalir dari dan ke negara sedang berkembang, ekspor negara sedang berkembang didominasi oleh hasil sumber daya alam, sedangkan impor mereka adalah barang hasil industri (Robertson, 1994; Pearce dan Warford, 1993; Sarkar, 1992). Bank Dunia mencatat, misalnya pada tahun 1990, ekspor barang-barang primer dari negara-negara berpendapatan rendah (kecuali Cina dan India) sebesar 72% dari total ekspor mereka, padahal ekspor barang serupa dari negara maju pada tahun yang sama adalah 19% (World Bank, 1992). Data yang sama menyebutkan bahwa impor barang hasil industri negara-negara berpendapatan rendah adalah 67%, sedang negara maju 71%.

¹ Dosen tetap di Fakultas Ekonomi, Jurusan Studi Pembangunan, Universitas Katolik Parahyangan.

Melihat besarnya persentase barang primer dalam ekspor negara sedang berkembang, timbul pertanyaan, akankah ekspor tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan di negara-negara sedang berkembang? Terutama bila dihubungkan dengan kenyataan makin turunnya nilai tukar perdagangan antara barang primer dan barang hasil industri, kinerja pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di negara sedang berkembang yang masih cenderung mengesampingkan kelestarian lingkungan dan krisis utang luar negeri yang bisa jadi juga akan memberi andil terhadap makin buruknya pengelolaan sumber daya di negara tersebut.

Mundurannya Nilai Tukar Perdagangan (Terms of Trade) Negara Berkembang

Isyu tentang makin memburuknya *terms of trade* (selanjutnya TOT) yang dihadapi negara sedang berkembang pertama kali dikemukakan oleh Prebisch dan Singer di tahun 1950an (Sarkar, 1992). Meskipun masih ada perdebatan apakah benar TOT negara-negara sedang berkembang terus menurun, satu hal yang jelas adalah TOT negara sedang berkembang tidak pernah lebih baik dari TOT negara pengekspor barang hasil industri. Tabel-2 memuat perubahan TOT berdasarkan kelompok negara yang berbeda antara tahun 1986-1992. TOT negara sedang berkembang terutama pengekspor barang hasil pertanian (barang primer) memiliki trend yang menurun (bertanda negatif). Sebaliknya negara-negara industri meskipun beberapa tahun juga mengalami penurunan, keadaannya masih jauh lebih baik dibanding kelompok negara pertama.

Tabel-2 Persentase Perubahan Nilai Tukar Perdagangan Beberapa Kelompok Negara 1986-1992

Kelompok Negara	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Negara Industri:	9,2	0,8	1,5	-0,2	-0,4	0,8	-0,5
• Canada	-2,4	3,2	2,5	1,0	-2,2	0,8	-0,1
• Amerika Serikat	-0,3	-6,9	2,0	1,0	-1,8	-0,1	-1,1
• Jepang	34,4	1,0	2,4	-4,2	-6,1	8,2	-1,5
• Prancis	11,8	0,7	0,4	-0,8	-0,1	-0,4	-0,5
• Inggris	-5,1	0,8	0,3	3,2	1,6	3,7	-0,1
Negara Sedang Berkembang:	-15,2	2,1	-4,0	1,8	3,6	-2,1	0,5
• Negara Pengekspor Hasil Industri	3,4	-	1,0	0,5	-1,3	-	0,9
• Negara Pengekspor Hasil Pertanian	-2,6	-6,7	5,5	-2,2	-7,3	-5,9	0,3
• Negara Pengekspor Hasil Tambang	-2,2	-10,6	0,9	-3,2	-7,4	-5,9	-2,4
• Negara Kreditur	-37,2	2,1	15,0	-0,4	-6,8	-5,9	4,3
• Negara Debitur	-10,3	14,9	-13,7	7,5	5,3	-3,2	-1,5
	-15,2	-0,3	-2,2	0,8	3,3	-1,7	0,8

Sumber: IMF, 1991

Menurut Sarkar (1992), ada dua alasan turunnya TOT negara pengekspor komoditi hasil pertanian. Pertama, permintaan barang hasil pertanian biasanya inelastis, karena komoditi primer ini adalah bahan kebutuhan pokok. Apalagi banyak negara maju yang juga menghasilkan barang primer yang sama (dengan tingkat produktivitas yang juga lebih tinggi) atau barang penggantinya. Contohnya adalah ketika ekspor gula pasir dari negara-negara Fiji, Mauritius dan kepulauan Karibia yang menghadapi ekspor gula bit dari negara-negara industri. Sebelum menjadi pengekspor gula bit, mereka merupakan negara pengimpor gula pasir dari ketiga negara yang disebutkan di atas (WCED, 1987). Kejadian ini

menyebabkan anjlognya harga gula pasir di pasar internasional. Disamping itu ada kecenderungan pula tingkat proteksi di negara maju juga makin tinggi. Lemahnya posisi negara berkembang dalam hal ini membuat kelompok negara ini hanya sebagai 'price taker', tidak ada pilihan lain kecuali menyetujui harga yang ditetapkan oleh pembeli.

Alasan kedua menurunnya TOT negara sedang berkembang adalah kemajuan teknologi di negara maju lebih cepat dibanding di negara berkembang. Teknologi yang mampu menggantikan fungsi komoditi primer dengan barang substitusinya. Sayangnya akses ke teknologi tersebut tidak merata antara negara maju dan negara berkembang. Teknologi baru berarti juga pengeluaran yang besar sehingga hanya negara-negara berpendapatan tinggi yang dapat memanfaatkannya. Ini menyebabkan negara sedang berkembang tidak memiliki pilihan lain kecuali tetap tergantung pada komoditi primer.

Perdagangan Internasional dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) boleh dikatakan sebagai konsep pembangunan yang terbaru. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Bruntland Commission dalam "Our Common Future", pembangunan berkelanjutan adalah: "pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemungkinan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya" (WCED,1987:87). Apakah perdagangan internasional yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian di negara-negara berkembang tidak seiring dengan konsep pembangunan berkelanjutan?. Pertama akan dilihat kecenderungan praktek pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Kondisi ini akan diperparah oleh kebutuhan pengembalian hutang luar negeri negara-negara sedang berkembang.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Negara Sedang Berkembang

Beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam di negara sedang berkembang menunjukkan praktek yang tidak sejalan dengan konsep berkelanjutan. Misalnya penambangan di Irian Jaya oleh PT Freeport. Sebelum tahun 1974, Irian Jaya dikenal sebagai "surga yang hijau, 'kosong' dan belum tersentuh manusia" (Aditjondro,1994:115). Sejak tahun 1974, ketika Freeport, sebuah perusahaan yang berpusat di Amerika, mulai melakukan usaha penambangan emas, perak dan tembaga, mulai muncul pula masalah lingkungan. Munculnya lubang-lubang raksasa berdiameter 2 km dan sedalam 1 km sisa penambangan dan membukitnya semacam pasir (*tailings*) yang bersifat asam telah mencemari sungai Ajkwa dan Minajeri (Anon.,1995b). Pencemaran ini telah menyebabkan matinya vegetasi di sepanjang sungai tersebut, seperti yang telah ditemukan oleh WALHI.

Contoh lain adalah pemanfaatan hutan tropis. Penebangan hutan di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina tidak berdasarkan pada konsep hasil yang berkelanjutan (*sustainable yield*). Nectoux dan Kuroda (1989, seperti dikutip Pearce dan Warford,1993) mengatakan bahwa Filipina adalah pengeksport kayu terbesar ke Jepang di tahun 1970an, tetapi kini ekspor kayu negara tersebut ke Jepang hampir mendekati nol. Ironisnya, Jepang sering mengatakan bahwa hutan di negaranya dikelola secara *sustainable*. Pemanfaatan hutan sebagai penghasil kayu di negara-negara pengeksport biasanya hanya berdasarkan biaya dan manfaat secara finansial, dan mengabaikan akibatnya terhadap fungsi hutan yang lain misalnya sebagai penyimpan carbondioksida

(CO₂) dan sebagai sumber keanekaragaman hayati. Jelas ini tidak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Hutang Luar Negeri Negara Sedang Berkembang

Masalah krisis hutang luar negeri yang dihadapi negara sedang berkembang muncul ke permukaan awal tahun 1980an ketika suku bunga dalam dollar meningkat, sementara itu pada waktu yang sama hampir seluruh negara maju sedang menghadapi resesi ekonomi (Lissakers, 1989). Naiknya suku bunga berarti pula meningkatnya biaya hutang. Di sisi lain, resesi di negara maju telah menurunkan permintaan terhadap barang-barang impor dari negara sedang berkembang. Keadaan ini tentu akan membuat negara berkembang yang juga sebagai negara debitur berada pada posisi ekonomi yang sulit. Tabel-3 menggambarkan data tentang persentase hutang luar negeri terhadap besarnya GNP beberapa kelompok negara. Dari tabel terlihat bahwa rata-rata persentase hutang terhadap GNP di kelompok negara-negara tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali kelompok negara Amerika Latin dan Karibia.

Tabel-3 Persentase Hutang Luar Negeri Terhadap GNP Beberapa Kelompok Negara

Kelompok Negara	Tahun 1980 (a)	Tahun 1989 (b)	Tahun 1990 (b)
Sub-Sahara Afrika	28,5	82,4	88,2
Timur Selatan dan Pasifik	16,8	20,4	23,6
Asia Selatan	17,3	20,6	28,2
Eropa	23,8	23,4	31,3
Timur Tengah & Afrika Utara	31,1	46,7	40,3
Amerika Latin dan Karibia	35,2	45,5	38,1

Sumber: (a) World Bank, 1992

(b) World Bank, 1994

Penyebab lain makin meningkatnya hutang luar negeri negara-negara sedang berkembang adalah adanya perubahan kurs antar mata uang. Ini terjadi juga misalnya ketika terjadi Yendaka tahun 1995 yang lalu. Apresiasi Yen terhadap Dollar telah membuat kewajiban membayar hutang Indonesia membengkak. Di satu sisi sekitar 40% hutang Indonesia adalah dalam bentuk Yen, sementara itu pendapatan ekspor adalah dalam Dollar. Bila yang terjadi seperti ini, tidak ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan ekspor yang dialokasikan untuk membayar hutang luar negeri, kecuali menaikkan volume ekspor.

Hubungan sebab akibat antara meningkatnya hutang luar negeri dan kerusakan lingkungan dapat pula dilihat dari sudut pandang yang lain. Semakin besar kewajiban membayar hutang suatu negara, semakin sedikit fasilitas/barang-barang publik seperti pendidikan, sarana kesehatan dan fasilitas sosial yang lain, yang dapat dibangun, karena dana untuk melakukannya semakin terbatas. Hal ini akan mendorong masyarakat negara yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat rusaknya lingkungan hidup untuk bertahan hidup (Hunt, 1992; Myer seperti dikutip oleh George, 1992).

Capistrano dan Kiker (dikutip oleh Pearce dan Warford, 1993) melakukan studi untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penggundulan hutan (*deforestation*). Kesimpulannya adalah semakin tinggi hutang suatu negara semakin rendah tingkat penggundulan hutannya. Tetapi mereka mengingatkan untuk berhati-hati dalam menanggapi hasil studinya. Hal ini dapat dimengerti bila mengingat bahwa peran ekspor kayu dan produk hasil hutan di beberapa negara seperti Indonesia, sangat penting dari sisi

pendapatan ekspor. Apalagi sering pula secara terang-terangan pemerintah negara-negara pengekspor hasil hutan menyatakan dan bahkan memberikan beberapa fasilitas khusus, misalnya subsidi atau *tax holiday* untuk mendorong ekspor hasil hutan.

Industrialisasi

Menyadari bahwa produk primer tidak dapat diandalkan sebagai penghasil devisa, terutama karena makin menurunnya TOT, negara-negara berkembang biasanya melirik produk hasil industri, sehingga pembangunan sering pula diartikan sebagai proses industrialisasi. Sayangnya, proses industrialisasi di negara-negara yang sedang berkembang biasanya menghadapi banyak kendala untuk dapat seiring dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Paling tidak ada dua pola proses industrialisasi di negara-negara sedang berkembang. Pola pertama adalah *Foreign Direct Investment* (FDI). Relokasi industri-industri ke luar negeri adalah contohnya. Ini banyak dialami oleh negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, juga negara-negara berkembang lain seperti Vietnam atau Cina yang menerima FDI dari Jepang atau Amerika. Alasan utama relokasi industri biasanya untuk mendapatkan upah buruh yang lebih murah. Tetapi tidak tertutup kemungkinan alasan relokasi tersebut adalah karena hukum dan peraturan di negara-negara tujuan relokasi tidak seketat negara asal industri, termasuk di bidang lingkungan hidup (Bogart, 1989). Dari sisi negara sedang berkembang sering ada kecenderungan membuat peraturan di bidang kelestarian lingkungan yang cukup longgar dengan maksud untuk menarik investor asing menanamkan modal di negaranya, dan meningkatkan daya saing ekspor (Hare, 1992). Union Carbide, produsen pestisida, yang berpindah lokasi dari Connecticut di Amerika Serikat ke Bhopal, India, merupakan salah satu contoh relokasi industri. Kebutuhan induk perusahaan pestisida tersebut untuk menekan biaya produksi dengan menggunakan buruh warga Bhopal yang berupah rendah bertemu dengan kepentingan pemerintah India untuk mendapatkan devisa dari hasil ekspor pestisida dan sekaligus menurunkan angka pengangguran di negaranya. Ketika akhirnya terjadi tragedi Bhopal yang menewaskan paling tidak 2000 orang dan lebih dari 200.000 orang menjadi buta dan menderita luka-luka, orang mulai berpikir bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mengabaikan masalah kelestarian lingkungan hidup.

Model kedua dari proses industrialisasi adalah jika investor domestik yang menanamkan modal, tetapi teknologinya diimpor dari luar. Proses ini tidak akan menimbulkan masalah kerusakan lingkungan bila yang diimpor adalah 'teknologi yang ramah lingkungan'. Sayangnya, tidak jarang teknologi yang di negara asal sudah ditinggalkan karena ternyata merusak lingkungan kemudian diimpor dan diterapkan dalam proses industri di negara-negara yang sedang berkembang. Contohnya adalah polusi yang terjadi di sungai Ciujung, Jawa Barat (Anon., 1995a).

Sungai Ciujung merupakan sumber air bagi warga setempat. Mereka tidak hanya menggunakannya untuk keperluan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk usaha perikanan. Sejak ada beberapa pabrik *pulp* (bubur kayu) dan kertas yang berlokasi di dekat sungai tersebut dan kemudian membuang limbah cairnya ke sungai Ciujung, air sungai tersebut praktis tidak dapat digunakan lagi. Masyarakat yang masih menggunakannya untuk mandi menderita penyakit gatal-gatal dan petani udang harus menanggung kerugian yang besar karena produksi udang mereka turun drastis dari 2 ton per hektar menjadi hanya 150 - 500 kilogram per hektar (Anon., 1995a). Berdasarkan laporan Warta Ekonomi (1995a) salah satu pabrik *pulp* dan kertas pencemar, yaitu *PT Indah Kiat Pulp and Paper* yang dikonfirmasi mengenai kasus pencemaran sungai Ciujung ini mengatakan, sebenarnya

pihak pabrik sudah mengetahui adanya teknologi lain yang "lebih bersih", tetapi masih enggan menerapkannya. Alasan yang dikemukakan adalah mereka akan menderita kerugian jika menerapkan teknologi tersebut, karena metode yang baru masih mahal menurut mereka. Mahalnya biaya produksi tentu akan memaksa produsen menaikkan harga outputnya, dan mengurangi keunggulannya bersaing.

Keunggulan Bersaing dan Isu Lingkungan Hidup dalam Pasar Persaingan Global

Bila kecenderungan yang diperlihatkan oleh contoh-contoh di atas terus berlanjut, adanya kenaikan volume perdagangan memang dapat berdampak buruk pada kelestarian lingkungan hidup di negara-negara sedang berkembang. Keinginan untuk memperoleh devisa, menaikkan pendapatan nasionalnya, serta menurunkan tingkat pengangguran di satu sisi, dibarengi dengan adanya keterbatasan dana untuk mengakses teknologi-teknologi baru yang ramah lingkungan tetapi relatif mahal akan mendorong negara-negara sedang berkembang menghadapi dilema antara ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Apalagi di era perdagangan bebas, saat produk dari berbagai negara dapat masuk dengan bebas ke negara lain tanpa ada hambatan, keunggulan bersaing produk yang bertumpu pada efisiensi yang tinggi sangat menentukan dapat bertahan tidaknya suatu perusahaan dalam persaingan. Sehingga, penerapan praktek-praktek yang bersahabat dengan lingkungan dalam proses produksi yang dianggap mahal tentu tidak menarik untuk diterapkan. Lalu, adakah cara lain untuk mengurangi dampak buruk dari perdagangan internasional, sementara negara-negara sedang berkembang tetap dapat memetik manfaat dari perdagangan internasional tersebut. Kunci dari semua itu adalah selera konsumen.

Dalam teori permintaan, selera konsumen adalah salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah yang akan dibeli. Faktor penentu lain misalnya harga barang yang bersangkutan, harga barang lain, besarnya pendapatan konsumen dan sebagainya. Dalam kaitan dengan keunggulan bersaing yang menjadi alasan produsen tidak menerapkan proses produksi bersih, bebas polusi seperti yang dikemukakan di atas sejauh ini hanya menyangkut terbentuknya harga barang yang bersangkutan. Padahal faktor lain seperti selera tidak kalah pentingnya. Fakta tentang dilarangnya produk kayu tropis masuk ke pasaran beberapa negara Eropa beberapa tahun lalu dan juga ditutupnya tidak kurang dari 4 buah perusahaan sepatu di Indonesia merupakan beberapa contoh bahwa selera konsumen telah sanggup mempengaruhi kelanjutan produksi perusahaan-perusahaan penghasil barang dan jasa. Dalam contoh ditutupnya pabrik sepatu di Indonesia yang induknya ada di Amerika, sekalipun alasannya adalah tidak puasnya konsumen di negara maju tersebut terhadap sistem penggajian di perusahaan itu, kasus ini dapat dianalogikan dengan bila konsumen semakin sadar akan perlunya kelestarian lingkungan sehingga mereka mampu memaksa perusahaan untuk melakukan proses produksi yang ramah lingkungan.

Sampai dimanakah kesadaran konsumen akan pentingnya proses produksi yang ramah lingkungan (*gerakan green consumerism*) sehingga keputusannya untuk membeli barang dan jasa akan dilandasi oleh pertimbangan apakah barang atau jasa yang diproduksi dari proses produksi yang bersahabat dengan lingkungan atau tidak, dan bukannya faktor lain? Banyak hal yang mempengaruhinya, antara lain adalah informasi/pengetahuan yang dimiliki konsumen, baik pengetahuan tentang proses produksi 'bersih' atau tanpa polusi, maupun informasi mengenai proses produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang akan dibelinya. Sehingga, dengan informasi yang lengkap konsumen dapat memiliki landasan yang dipakai untuk melakukan pilihan. Faktor

yang kedua adalah seberapa penting masalah lingkungan tersebut bila dibandingkan dengan masalah harga. Bagi masyarakat berpendapatan tinggi, harga mahal mungkin bukan merupakan masalah, lain halnya bagi konsumen berpendapatan rendah. Golongan konsumen yang terakhir ini pasti akan menempatkan harga rendah bagi barang dan jasa yang dikonsumsi sebagai faktor utama dalam memilih produk. Kecuali jika akibat dari proses produksi, yang sekalipun murah tetapi sangat mengganggu kehidupan golongan masyarakat berpendapatan rendah ini, mungkin kelompok ini akan lebih memilih produk sejenis yang meskipun lebih mahal harganya tetapi lebih baik dari sudut pelestarian lingkungan.

Penutup

Perdagangan internasional tidak dapat dipungkiri telah memperbaiki kinerja perekonomian banyak negara di dunia. Dari sisi negara sedang berkembang yang sebagian besar ekspornya bertumpu pada produk primer, perdagangan internasional sering 'berhadapan' dengan usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. Makin turunnya TOT negara-negara pengekspor barang primer ini memaksa mereka untuk makin menambah volume ekspor hanya untuk mendapatkan jumlah devisa yang tetap. Di sisi lain, makin besarnya kewajiban membayar hutang luar negeri oleh negara dunia ketiga ini juga dapat merupakan penyebab yang potensial akan makin besarnya volume ekspor barang primer. Sementara itu praktek pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam di negara sedang berkembang masih sering mengabaikan masalah lingkungan hidup. Proses industrialisasi sering pula belum seiring dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Relokasi industri-industri dari negara-negara maju ke kelompok negara sedang berkembang sering diikuti pula dengan masuknya masalah polusi hasil industri. Keengganan sektor industri untuk menerapkan teknologi untuk proses produksi yang ramah lingkungan biasanya berdasarkan alasan mahal teknologi tersebut. Tingginya ongkos produksi dikhawatirkan akan menaikkan harga produk dan akhirnya menurunkan daya saing produk yang bersangkutan. Gerakan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dari proses yang ramah lingkungan dapat memaksa produsen untuk, mau tidak mau, menerapkan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan. Bila hal ini terjadi, perdagangan internasional justru dapat menjadi pemicu makin cepatnya proses produksi yang memperhatikan kelestarian lingkungan diterapkan di negara sedang berkembang.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, G.J., 1988. "Problem of Forestry and Land Use in the Asia-Pacific Region: the Irian Jaya Experience", dalam Hughes, P.J. dan Thirwall, C.(ed), *The Ethics of Development: Choices in Development Planning*, University of Papua New Guinea Press, Port Moresby:104-16.
- Anonim, 1995a, "Keujung Limbah Mengalir", *Warta Ekonomi*;30 Januari:40-1.
- Anonim, 1995b, "Buka Freeport, Tapi Pemanasan Global", *Warta Ekonomi*;3 April:35-6.
- Bogart, W.,1989. *The Bhopal Tragedy: Language, Logic and Politics in the Production of a Hazard*, Wesview Press, Boulder.
- George, S., 1992. *The Debt Boomerang: How Third World Debts Harms Us All*, Pluto Press, London.
- Hare,B., 1992. "International Competitiveness and ESD", *Habitat*;20(1):32-3.
- Hunt, J., 1992. "One Earth-One World", *Habitat*;20(1):38-41.
- IMF, 1991. *World Economic Outlook October 1991*, IMF, Washington.

- Meier, G. (ed), 1989. *Leading Issues in Economic development*, edisi ke-5, Oxford University Press, New York.
- Pearce, D. dan Warford, J.J., 1993. *World Without End: Economies, Environment, and Sustainable Development*, Oxford University Press, New York.
- Robertson, D., 1994. *Development Issues: Environment, Trade and Development*, Economics Division Working Paper, 94/2, RSPAS, ANU, Canberra.
- Sarkar, P., 1992., *Terms of Trade of the South Vis-a-vis the North: are They Declining?*, Institute of Development Discussion Paper No.304, July, IDS, Broughton.
- UNCTAD, 1991, *Handbook of International Trade and Development Statistics 1990*, UN, New York.
- WCED, 1987. *Our Common Future*, Oxford University Press.
- Westphal, L.E., 1978. "The Republic of Korea's Experience with Export-Led Industrial Development", *World Development*, 6(3).
- World Bank, 1992. *World Development Report 1992: Development and Environment*, Oxford University Press.
- World Bank, 1994. *World Economic Report 1994: Infrastructure for Development*, Oxford University Press.